

# Indeks Toleransi

## Kabupaten Lombok Tengah 2021

Secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia cukup baik. Berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: operasionalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama, fasilitasi untuk kegiatan dialog antar dan intern umat beragama, kerjasama lintas agama, penanganan korban paska konflik, dan pengembangan wawasan multikultur kepada guru agama.

Peningkatan kerukunan umat beragama masih dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu pengelolaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial belum optimal. Upaya peningkatan kerukunan umat beragama baru menyentuh sebagian masyarakat dan lapisan elit agama, baik tokoh agama maupun majelis agama. Permasalahan mendasar lainnya adalah Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara komprehensif mengakomodasi dinamika perubahan dan perkembangan di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik. Dengan demikian tantangan yang dihadapi di bidang peningkatan kerukunan hidup umat beragama adalah meningkatkan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat, pengembangan budaya damai dan gerakan hidup rukun sehingga tercipta pemahaman dan persepsi masyarakat yang toleran, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap perbedaan agama.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan, serta fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.

Studi tentang toleransi telah banyak dilakukan, salah satunya yang lazim digunakan sebagai model penelitian kuantitatif tentang toleransi adalah yang dilakukan oleh Bogardus pada tahun 1925. Studi ini kemudian direplikasi pada tahun 1946, 1956, 1966, dan 2005. Fokus kajiannya adalah pada pengukuran sejauh mana penerimaan seseorang terhadap orang lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengan dirinya. Konsep Bogardus ini kemudian populer dengan sebutan Social Distance Scale yang kemudian banyak digunakan sebagai alat ukur toleransi sosial. Bogardus mendefinisikan jarak sosial (social distance) sebagai *function of affective distance between the members of two groups: in social distance studies the center of attention is on the feeling reactions of persons toward other persons and toward groups of people* (Bogardus, 1947). Dalam konsep ini, jarak sosial pada dasarnya diukur dari seberapa besar simpati yang dirasakan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda dengan dirinya.

Pengumpulan data mengenai toleransi antarumat beragama ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Dengan cara ini diharapkan bisa tergambar generalisasi pola hubungan antarumat beragama yang ada. Hubungan yang dimaksud berkaitan dengan tingkat keintiman (intimacy) atau bahkan sebaliknya kebencian yang menyertainya. Dengan kata lain, toleransi dalam hubungan antarumat

beragama ini akan diukur melalui seberapa jauh para pemeluk agama menentukan jarak sosial mereka terhadap para pemeluk agama lainnya. Selain mengukur jarak sosial yang mencerminkan toleransi umat beragama, penelitian ini juga menambahkan variabel sikap pemerintah sebagai variabel yang dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar persepsi dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memelihara kondisi kerukunan antarumat beragama. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal untuk mengatur hubungan-hubungan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antarumat beragama, menjadi aktor yang berperan strategis untuk mendukung terciptanya toleransi yang kondusif.

Keempat dimensi yang menjadi fokus survei ini, yaitu "persepsi", "sikap", "kerjasama", dan "sikap pemerintah", dijelaskan melalui beberapa indikator yang dirumuskan melalui item-item pertanyaan dalam kuesioner. Indikator yang memperlihatkan empat dimensi di atas diberi bobot, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dalam jawaban pada kuesioner, para responden diminta untuk memilih salah satu dari 5 jawaban, yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Jawaban tersebut diberi skor, yakni 5 untuk SS, 4 untuk S, 3 untuk N, 2 untuk TS, dan 1 untuk STS. Pembobotan jawaban dalam skala Likert pada umumnya berjumlah ganjil: 3, 5, 7 dan seterusnya. Dalam penelitian ini ditetapkan 5 variasi, artinya 1 – 5, yang dianggap sudah cukup untuk mengakomodasi semua variasi jawaban yang diberikan para responden.

## **1. Persepsi tentang Toleransi**

Persepsi adalah penilaian yang dalam hal ini terhadap kelompok agama lain, baik mengenai gambaran umumnya, masyarakatnya ataupun apa yang dilakukan oleh masyarakat agama lain bersangkutan. Konflik-konflik yang muncul antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lainnya bisa berasal dari adanya persepsi yang keliru atau pandangan jelek terhadap agama lain dan pemeluknya. Persepsi ini muncul setelah mereka melihat dan memberikan penilaian terhadap kelompok agama lain tersebut yang dianggapnya merugikan agama atau kelompok mereka. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran kenapa hubungan sosial antar pemeluk agama memanas dan kenapa suatu konflik terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh, diperoleh temuan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan toleransi antarumat beragama. Sebagian besar responden telah menyadari bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini didukung oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan hak-hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan beribadah. Secara umum, persepsi responden terhadap toleransi cukup tinggi. Hal ini didukung oleh semua agama mengajarkan toleransi dan kerukunan sesuai syariat masing-masing. Mayoritas responden setuju bahwa konflik antar umat beragama yang terjadi tidak berhubungan dengan masalah ekonomi dan politik namun hal tersebut cenderung disebabkan oleh persoalan pribadi atau individu yang bersangkutan. Dari data di atas juga menunjukkan bahwa tokoh agama dan organisasi keagamaan

memegang peran penting dalam mengayomi masyarakat khususnya terkait dengan penanaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang dianut.

## **2. Sikap tentang Toleransi**

Sikap, yakni pendirian yang diperlihatkan oleh para pemeluk agama yang berupa respon terhadap pemeluk agama lainnya. Aspek ini akan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh pemeluk agama sehubungan dengan hadirnya fakta sosial di hadapan mereka. Dalam penelitian ini, sikap mayoritas responden menunjukkan bahwa mereka relatif terbuka dalam berinteraksi sosial dengan umat yang berbeda agama.

Responden bersedia melakukan interaksi sosial dengan pemeluk agama lain dan bertempat tinggal dilingkungan yang sama tanpa melihat perbedaan agama yang ada. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden dengan jawaban setuju dengan frekuensi tinggi misalnya pada subvariabel Saya bersedia bergaul (menyapa, mengobrol, dll) dengan pemeluk agama lain (66,67%), saya bersedia untuk bermusyawarah/berdamai dengan pemeluk agama lain jika terjadi perselisihan (64,67%) dan Saya bersedia bersahabat dengan pemeluk agama lain (61,42%). Bahkan sebagian responden bersedia dalam melakukan hubungan sosial tidak pernah membedakan seseorang berdasarkan agamanya (59,93%).

## **3. Kerjasama-Hubungan sosial Antar Umat Beragama**

Kerjasama, yakni aspek hubungan sosial antara para pemeluk agama yang berbeda. Persepsi atau penilaian selain bisa mendorong lahirnya sikap juga bisa melahirkan tindakan-tindakan kerjasama. Jadi kalau sikap lebih merupakan tindakan ke dalam dalam artian belum melahirkan tindakan nyata berkaitan dengan hubungan mereka dengan pemeluk agama lain, kerjasama adalah realitas hubungan sosial.

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur indeks kerukunan adalah kerjasama antar umat beragama/hubungan sosial. Data menunjukkan secara keseluruhan sub variabel yang diukur berada pada posisi baik dan sangat baik. Misalnya subvariabel bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain memperoleh nilai baik. Ini berarti dalam konteks hubungan sosial, masyarakat secara umum tidak mempermasalahkan identitas keagamaan. Hal yang sama juga terjadi pada aspek hubungan kerja dimana subvariabel saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lainnya memperoleh nilai yang cukup baik. Namun pada subvariabel "bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain" sebagian besar responden menunjukkan tidak mengizinkan kegiatan keagamaan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan subvariabel "tidak keberatan apabila pemeluk agama lain membangun tempat peribadatannya di lingkungan tempat tinggal saya" pada dimensi sikap dimana sebagian besar responden menjawab keberatan apabila ada pembangunan tempat ibadah agama lain di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Ini menunjukkan bahwa adanya keengganan masyarakat untuk melibatkan diri pada kegiatan yang terkait dengan "ruang privat".

## **4. Sikap Pemerintah**

Penelitian ini juga menambahkan variabel sikap pemerintah sebagai variabel yang dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar persepsi dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memelihara kondisi kerukunan antar umat beragama. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal untuk mengatur hubungan-hubungan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antarumat beragama, menjadi aktor yang berperan strategis untuk mendukung terciptanya toleransi yang kondusif.

Secara umum, berdasarkan jawaban responden terdapat 3 kategori utama yaitu kategori jawaban yang berada memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju, netral dan tidak setuju yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju menunjukkan bahwa sikap pemerintah dinilai baik dalam memelihara hubungan antar umat beragama. Adapun beberapa sikap pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik (65,79%).
  - Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama (61,80%)
  - Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik (61,05%)
- b. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori netral pada ketiga indikator di bawah ini:
  - Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama (31,84%)
  - Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya (28,71%).
  - Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik (24,47%)
- c. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori tidak setuju terdapat pada indikator di bawah ini:
  - Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik (4,12)
  - Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik (3,75%)
  - Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik (3,37)

Dari data responden di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pemerintah dalam membina kerukunan beragama cukup baik misalnya dalam hal fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama dan memfasilitasi dialog antar umat agama. Namun demikian pemerintah harus terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal prosedur perizinan pembangunan rumah ibadah. Data responden yang menunjukkan netral dan tidak setuju tertinggi pada subvariabel yang terkait perizinan pendirian rumah ibadah. Kedepannya pemerintah perlu meningkatkan lagi sosialisasi berbagai kebijakan dan peraturan terkait hal tersebut.

## 5. Indeks Dimensi Toleransi

Dari hasil penghitungan indeks masing-masing dimensi maka dilakukan penghitungan untuk menyusun indeks komposit toleransi dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dan hasil penghitungan disajikan sebagaimana tabel berikut:

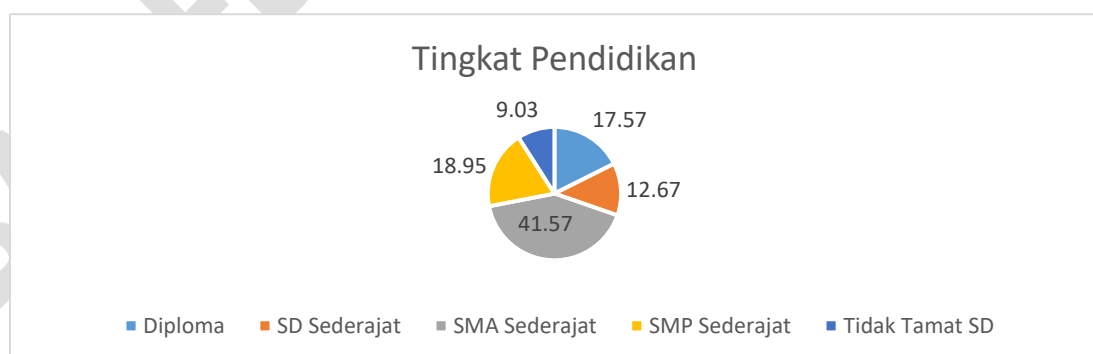
**Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2019 – 2021**

Uraian Capaian Indeks	Tahun					
	2019		2020		2021	
	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori
Indeks Dimensi Persepsi	3,80	Tinggi	3,91	Tinggi	3,88	Tinggi
Indeks Dimensi Sikap	3,27	Cukup	3,24	Cukup	3,10	Cukup
Indeks Dimensi Kerjasama-Hub. Sosial	3,32	Cukup	3,34	Cukup	3,16	Cukup
Indeks Sikap Pemerintah	3,88	Tinggi	4,10	Tinggi	3,93	Tinggi
<b>INDEKS TOLERANSI</b>	<b>3,56</b>	Tinggi	<b>3,72</b>	Tinggi	<b>3,61</b>	Tinggi

Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 sebesar 3,64 dan masuk dalam kategori tinggi berdasarkan pada interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai pembentuk indeks, dimensi sikap memiliki nilai indeks terendah sebesar 3,10 dengan kategori cukup dan dimensi sikap pemerintah memiliki indeks tertinggi sebesar 3,93 dengan kategori tinggi.

## 6. Karakteristik Responden

### a) Tingkat Pendidikan



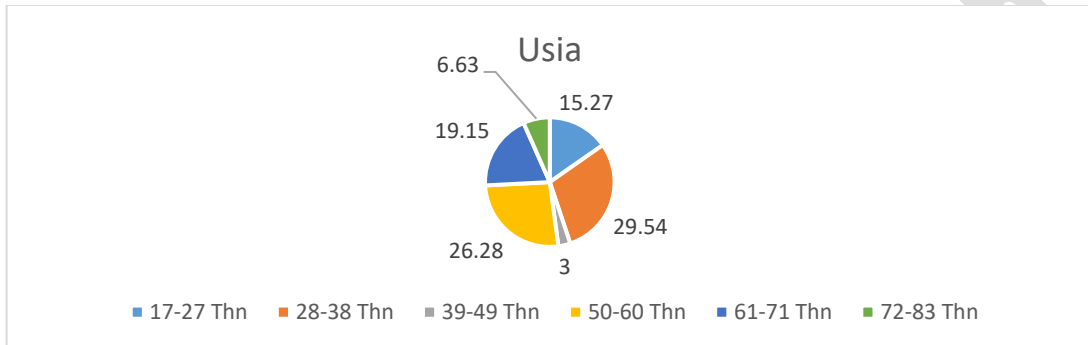
Gambar diatas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat memiliki pendidikan terakhir SMA Sederajat yaitu sebanyak 41,57 %, kemudian disusul SMP Sederajat 18,95%, kemudian responden yang tamat SD Sederajat 12,67% dan tamat diploma sebanyak 17,57% serta responden paling sedikit tidak tamat SD sebanyak 9,03%.

### Nilai Korelasi Tingkat Pendidikan Terhadap Indeks Toleransi

Nilai Korelasi	Dimensi			
	Persepsi	Sikap	Kerjasa Sama-Hub-Sosial	Sikap Pemerintah
	0.2060	0.1477	0.1144	0.1187

Tabel tersebut di atas menunjukkan karakteristik responden selaku masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat toleransi yang baik

#### b) Usia



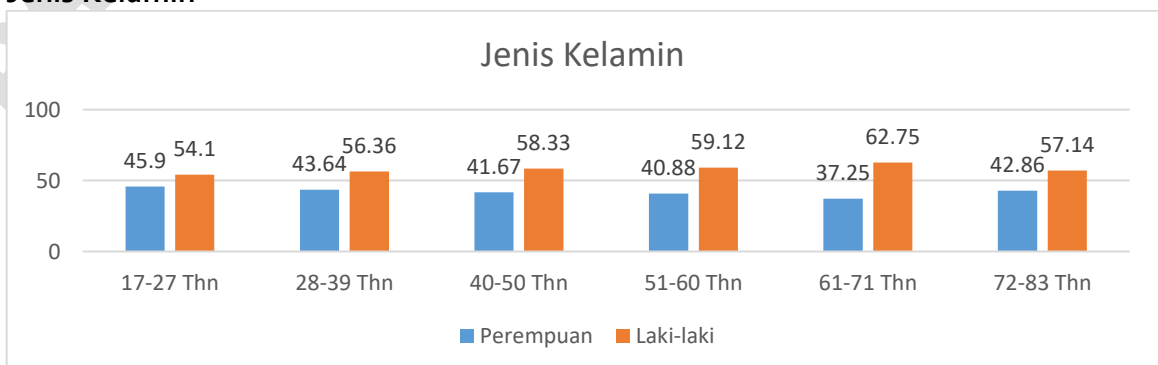
Gambar diatas menunjukkan jumlah responden usia 28-38 Tahun paling tinggi sebesar 29,54 % disusul pada usia 50-60 sebanyak 26,28 %, kemudian usia 61-71 tahun sebesar 19,15 %, usia antara 17-27 tahun sebanyak 15,27 % dan terakhir pada usia 72-83 Tahun sebesar 6,63 %.

### Nilai Korelasi Tingkat Usia Terhadap Indeks Toleransi

Nilai Korelasi	Dimensi			
	Persepsi	Sikap	Kerjasa Sama-Hub-Sosial	Sikap Pemerintah
	-0.1290	-0.0957	-0.1018	-0.0806

Tebel diatas menunjukaan bahwa semakin tua responden maka sikap toleransi terhadap persepsi, sikap, Kerjasama hubungan sosial dan sikap terhadap pemerintah semakin rendah.

#### c) Jenis Kelamin



Tabel diatas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun keatas laki-laki sebesar 54,10% perempuan 45,90%.

#### Nilai Korelasi Jenis Kelamin Terhadap Indeks Toleransi

Nilai Korelasi	Dimensi			
	Persepsi	Sikap	Kerjasa Sama-Hub-Sosial	Sikap Pemerintah
	0.1052	0.1039	0.1271	0.0818

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih toleran baik dari dimensi persepsi, sikap, Kerjasama hubungan social dan sikap pemerintah dibanding dengan responden perempuan. Dimana perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan dalam mengambil suatu keputusan/pandangan/bertindak.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data serta analisa dapat disimpulkan bahwa indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dengan skor 3,61 yang termasuk dalam kategori "**Tinggi**" (3,4 – 4,1) . Hal ini menandakan bahwa interaksi sosial antar umat beragama di Kabupaten Lombok Tengah sudah menunjukkan kondisi yang memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan toleransi antarumat beragama, sebagaimana tercermin juga dalam sikap antarumat beragama yang bersedia menerima secara terbuka keberadaan pemeluk agama yang berbeda dalam ranah pergaulan sosial maupun profesi, meskipun sebatas pada dimensi publik atau formal. sebagaimana hasil indeks 4 (empat) dimensi/variabel yang tercantum di bawah ini :

- Dari Hasil data responden, indeks dimensi persepsi sebesar 3,90. Indeks ini menunjukkan bahwa responden telah menyadari bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan yang dianut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kondisi ini didukung oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan intervensi pemerintah dalam mensosialisasikan hak-hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut;
- Pada Indeks dimensi/variabel sikap menunjukkan skor 3,18. Dimana Responden ini bersedia melakukan interaksi sosial dengan pemeluk agama lain dan bertempat tinggal dilingkungan yang sama tanpa melihat perbedaan agama yang ada dan bersedia bersahabat dengan pemeluk lain.
- Untuk Indeks dimensi kerjasama-hubungan sosial memiliki skor 3,16. Data menunjukkan secara keseluruhan sub variabel yang diukur berada pada posisi baik. Misalnya sub-variabel bersedia melakukan hubungan kerja sama dengan pemeluk agama lain. Hal yang sama juga terjadi pada aspek bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lainnya yang memerlukan memperlihatkan hasil yang cukup baik. Namun pada sub-variabel "membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya" sebagian besar responden tidak bersedia untuk membantu;
- Sedangkan Indeks dimensi ke 4 (Empat) yaitu sikap pemerintah memiliki skor 3,93. Dari hasil responden memperlihatkan bahwa secara umum kinerja pemerintah dalam membina kerukunan beragama cukup baik misalnya dalam hal memfasilitasi

pembangunan rumah ibadah, fasilitasi dialog antar umat beragama dan melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama.

#### **Rekomendasi**

- Pemerintah perlu berperan lebih optimal dalam hal sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan serta prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang berlaku, dan perlu lebih banyak mensosialisasikan pentingnya menjaga kerukunan didalam kehidupan bermasyarakat, dengan mempertahankan nilai-nilai yang sudah ditanamkan/dianut.
- Peningkatan Penguatan sikap toleransi antar umat beragama melalui jalur pendidikan mulai dari kalangan siswa sampai Perguruan Tinggi.
- Dalam rangka meminimalkan prasangka sosial, perlu ditumbuhkan kembali nilai-nilai sosial di masyarakat sehingga ada interaksi sosial yang lebih akrab antar masyarakat.